



# Aspal Terminal Penarukan Megaburan

**SINGARAJA** - Kualitas aspal di Terminal Penarukan, kini semakin memprihatinkan saja. Sejak pamornya mulai meredup di tahun 2005 silam, Terminal Penarukan jarang difungsikan. Kini terminal itu beralih menjadi lokasi transit kendaraan angkutan, terutama truk pengangkut material pasir.

Dari pantauan *Jawa Pos Radar Bali* siang kemarin aspal di Terminal Penarukan banyak yang mengelupas. Terutama di bagian pintu masuk, lambung barat terminal, serta jalur keluar terminal menuju Jalan Sam Ratulangi.

Ketika dilewati truk-truk material, utamanya dengan tonase besar, tak pelak aspal semakin rusak. Banyak bagian di lambung barat terminal, aspal tak lagi nampak dan berganti menjadi batu kerikil. Pada musim penghujan nanti, dikhawatirkan aspal kian rusak dan berubah menjadi kubangan air.

"Kalau *nggak* hati-hati ya bisa terguling truknya. Makanya harus pelan-pelan. Takutnya nanti kalau hujan, salah ambil jalur malah truknya yang rusak," ujar Gede Darma, salah seorang sopir yang kerap melintasi Terminal Penarukan.

Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan AP yang dikonfirmasi terpisah, mengakui kipi kondisi aspal di Terminal Penarukan memprihatinkan. Pihaknya sudah mengajukan alokasi anggaran perbaikan aspal pada tahun 2016 mendatang, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,6 miliar.

Meski anggarannya terbilang besar, Gunawan menyatakan tak semua bagian

terminal bisa diperbaiki aspalnya. "Kami prioritaskan jalur yang memang sering dilintasi truk saja. Misalnya di pintu masuk, lambung barat, dan jalur manuver ke Jalan Sam Ratulangi saja," kata Gunawan. Mantan Camat Sawan itu mengungkapkan, alokasi anggaran

itu memang terbatas, karena spesifikasi aspal yang digunakan sebagai pelapis akan lebih baik dari sebelumnya. Aspal memiliki spesifikasi khusus untuk kendaraan dengan tonase besar.

Sekadar diketahui, Terminal Penarukan kini dialihkan statusnya menjadi terminal

tipe C, sehingga pengelolaannya ada dibawah Dinas Perhubungan Buleleng. Saat ini Terminal Penarukan menyumbang 90 persen dari total target retribusi terminal. Dari target Rp 70 juta, sebanyak Rp 65,1 juta disumbangkan retribusi dari Terminal Penarukan. (eps/gup)

Edisi : Rabu, 18 November 2015

Hal : 29



# Belanja Mobil Damkar

## Baru Rp 14 M

### Mobil Lama Badung Bobrok, Tanpa Tender

**MANGUPURA** - Tingginya kasus kebakaran di Badung membuat Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) merencanakan penambahan pengadaan mobil operasional. Hanya saja, mobil operasional yang akan dibeli nilainya sangat besar. Dinas Damkar merencanakan belanja satu unit mobil Rp 14 miliar pada APBD induk 2016. Pembelian mobil ini juga tanpa melalui tender atau lelang. Kok bisa?

Kepala Disdamkar Badung IG Nyoman Adnyana didampingi Kabag Humas Pemkab Badung AA Gede Raka Yuda men-

gatakan, belanja mobil tidak melalui lelang karena mobil sudah tercantum dalam katalog elektronik (E-katalog). Sehingga mobil bisa dibeli di manapun. "Mobil operasional yang akan dibeli ini bukan mobil biasa. Mahal karena pengadaan mobil damkar dilengkapi dengan tangga hidrolik," ujar Gung Raka ditemui kemarin (17/11).

Lho bukannya Badung sudah mempunyai mobil damkar bertangga? Gung Raka menyebut mobil tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi digunakan. Kini mobil berada di kantor Damkar di Jalan Kebo Iwa Denpasar. Kenapa tidak itu saja diperbaiki? "Mobil tangga yang rusak juga akan kami perbaiki.

Semoga saja masih bisa diperbaiki, karena tidak mudah memperbaiki mobil seperti itu. Ounderdilnya dan teknisi khusus" imbuhnya. Dijelaskan lebih jauh, pengadaan mobil

damkar bertangga di Badung ini sangat penting. Pasalnya, setiap terjadi peristiwa kebakaran gedung bertingkat petugas selalu kewalahan.

Salah satunya kebakaran

yang terjadi pada bangunan bertingkat kantor sebuah bank di Kuta. Petugas damkar tidak bisa berbuat banyak lantaran tidak memiliki mobil pemadam bertangga. (san/han)

Edisi : Rabu, 18 November 2015

Hal : 24



HIBAH

## Pencairan Dana Rp 41 Miliar Ngadat

DENPASAR - Sempat dijanjikan akan segera cair, namun hingga saat ini pencairan dana hibah Pemprov Bali yang difasilitasi anggota DPRD Bali senilai Rp 41 miliar masih gabeng alias tak jelas.

Tak pelak hal ini membuat anggota Dewan Bali waswas. Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, menilai ngadatnya pencairan dana hibah, itu lebih karena proses administrasi pencairan dana hibah Provinsi Bali masih sedang perbaikan. Bahkan, sejumlah anggota dewan harus gencar melakukan komunikasi dengan konstituennya akan adanya banyak perbaikan administrasi. Termasuk adanya kesalahan saat mengajukan proposal sebelumnya.

Politisi Demokrat asal Jembrana ini menyebutkan, hampir setiap pencairan dana hibah ini tidak pernah bisa berjalan mulus. Demikian pula dengan pembahasan alokasi dana dalam APBD Bali. Dari tahun ke tahun, lanjutnya tidak pernah berjalan lancar bahkan tahun anggaran perubahan 2013 sebelumnya banyak dana hibah yang tidak bisa dicairkan

► Baca *Pencairan...* Hal 31

# Sebut Sangat Dibutuhkan Masyarakat

## ■ PENCAIRAN...

Sambungan dari hal 21

"Kami berharap tahun 2013 lalu tidak terulang kembali dan tahun ini bisa lancar dan cair semuanya meski saat ini masih dalam proses," ujarnya.

Dalam proses penyelesaian administrasi diharapkan pada masing-masing SKPD dapat memberikan penjelasan secara detail pada pemohon dana hibah. Bagaimanapun lanjutnya, pengurusan administrasi proposal dibutuhkan waktu cukup lama apalagi yang mengusulkan atau memohon dari kabupaten di ujung

paling barat. "Kalau administrasi tidak terpenuhi, dana tidak bisa dicairkan sementara masyarakat terus menanyakan pencairan dana hibah," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali Nyoman Suya-sa. Politisi asal Karangasem ini menyebutkan, pencairan dana hibah belum bisa lancar seperti apa yang menjadi harapan anggota DPRD Bali. Sementara administrasinya masih banyak yang belum bisa diselesaikan belum lagi adanya kesalahan yang harus diperbaiki. "Sejak adanya kepastian dan turunnya peraturan gubernur (pergub), sekarang mulai mengurus Surat

Keterangan Terdaftar (SKT)," katanya.

Surat Keterangan Terdaftar tersebut diawali dari pernyataan dari pihak mengajukan permohonan dana hibah. Pengurusan SKT ini juga harus dilakukan dari lembaga yang paling bawah, mulai dari kelian banjar, kepala desa, dan camat. Lebih-lebih bagi mereka yang mengajukan permohonan di luar desa adat minimal yang diusulkan mendapatkan bantuan itu sudah berjalan dua tahun. "Bagaimanapun dana hibah ini sangat penting dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan. Terpenting penggunaan dananya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (pra)

Edisi : Rabu, 18 November 2015

Hal : 21 dan 31